

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010

Oleh
A S R A N

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merupakan perwujudan dari mekanisme demokrasi anggaran, yang bertujuan agar anggaran rakyat dapat digunakan sesuai dengan alokasinya Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010?” Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif. Informan penelitian terdiri dari lima orang Ketua Komisi DPRD Provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 meliputi:

- (1) Pengawasan DPRD melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah, dilaksanakan oleh Komisi-Komisi DPRD dengan cara menyelenggarakan rapat kerja dengan pemerintah, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membahas perencanaan penggunaan APBD agar sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengawasan DPRD melalui kegiatan kunjungan kerja, dilaksanakan oleh DPRD dengan cara peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai oleh APBD untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Pengawasan DPRD melalui pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan APBD, dilaksanakan dengan cara menerima, menampung dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan APBD serta melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut.
- (4) Pengawasan DPRD melalui penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, dilaksanakan DPRD dengan cara menilai dan mengevaluasi laporan Kepala Daerah terkait dengan penggunaan APBD serta menentukan sikap untuk menerima atau menolak laporan tersebut secara objektif sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.

Kata Kunci: Pengawasan DPRD, Penggunaan APBD

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAMPUNG PARLIAMENT PROVINCE TOWARD USING OF REGIONAL BUDGET YEAR 2010

**By
A S R A N**

Parliament monitoring toward Lampung Province Budget was implementation of democratic mechanism budget, which aims to make people's budgets may be used in accordance with the local government allocations are expected to perform optimization shopping done efficiently and effectively to enhance the welfare of the community.

Formulation of the problem in this research is: "How is implementation of Lampung Parliament Province Toward Using of Regional Budget Year 2010?" The purpose of this research is to determine implementation of Lampung Parliament Province Toward Using of Regional Budget Year 2010.

This study uses qualitative type. Informants consisted of five Commission Chairman Lampung Province Parliament. Data collection was conducted through interviews and documentation. The data were then analyzed qualitatively, with the stage of data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study indicate that implementation of Lampung Parliament Province Toward Using of Regional Budget Year 2010: (1) Oversight Council through the commission's meeting with the government, carried out by the Commissions of Parliament by way of holding meetings with the government, especially Department which addresses the use of planning to fit the budget allocation. (2) Oversight Council through working visits, carried out by the Council by way of direct observation in the implementation of development programs and public services financed by the budget to ensure that the budget is used in accordance with a predetermined plan. (3) Oversight Council with public complaints about the alleged abuse of the budget, implemented by way of accepting, accommodating and follow up reports or complaints related to the alleged misuse of budget as well as to follow up on the report. (4) Oversight Council with an assessment of the accountability report Regional Head, Parliament conducted by assessing and evaluating the Regional Head reports related to budget and use their minds to accept or reject the report objectively according to the results of the evaluation that has been carried out.

Keywords: Monitoring of Parliament, Using of Regional Budget